



Bantuan Luar Negeri Pemerintah RI pada Era Joko Widodo Terkait Etnis Rohingya Tahun 2014-2019

Ferizka Metrisia Andrayasa^{1*}, Hasbi Sidik², Khairunnisa Simbolon³

¹, Student of International Relations Study, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study

*Corresponding author: International Relations Study Program, University of Lampung.

Email: chikaferizka04@gmail.com

ABSTRAK

Etnis Rohingya merupakan etnis Myanmar yang mengalami banyak penindasan yang mengakibatkan konflik ini menjadi atensi dunia internasional, salah satunya Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia turut berperan pada konflik etnis ini melalui bantuan luar negerinya kepada Rohingya. Bantuan tersebut telah diberikan dari tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang. Namun, terdapat asumsi yang mengatakan pemerintah Republik Indonesia di era Joko Widodo dirasa lebih memperlihatkan peran aktifnya dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Rohingya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bantuan luar negeri pemerintah Republik Indonesia kepada Rohingya di era Joko Widodo dan mendeskripsikan alasan pemberian bantuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik dokumentasi kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Hasil riset penelitian ini, yaitu bantuan luar negeri pemerintah Republik Indonesia meliputi 3 tujuan bantuan luar negeri, diantaranya kemanusiaan, pembangunan dan diplomatik. Pada kemanusiaan, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuannya berbentuk kebutuhan pokok. Pada pembangunan, pemerintah Republik Indonesia membangun infrastruktur di Rakhine seperti sekolah dan rumah sakit. Pada diplomatik, Indonesia melakukan dialog diskusi dan pertemuan dengan Myanmar ataupun negara lain seperti Bangladesh. Penyaluran bantuan dilaksanakan di setiap tahun pada periode pertama era Joko Widodo, yaitu tahun 2014-2019.

Kata Kunci: Pemerintah Republik Indonesia, Etnis Rohingya, Bantuan Luar Negeri

ABSTRACT

The Rohingya ethnic is a Myanmar ethnic that experienced a lot of oppression which resulted this conflict becoming the attention of the international community, one of which was Indonesia. The RI government played a role in this ethnic conflict through its foreign aid to the Rohingya. This assistance has been provided since 2012 and continues until now. However, there is an assumption that the RI government in the Joko Widodo era was felt to have shown a more active role in providing foreign aid to the Rohingya. The aim of this research is to describe the RI government's foreign assistance to the Rohingya in the Joko Widodo era and to describe the reasons for providing this assistance. This research uses a qualitative approach with qualitative documentation techniques. This research also uses secondary data. The results of this research are that the Indonesian government's foreign aid includes 3 foreign aid objectives, including humanitarian, development and diplomatic. In terms of humanity, the Indonesian government sends aid in the form of basic necessities. In development, the Indonesian

government built infrastructure in Rakhine such as schools and hospitals. In diplomatic, Indonesia holds dialogue discussions and meetings with Myanmar or other countries such as Bangladesh. Aid distribution was carried out every year in the first period of the Joko Widodo era, namely 2014-2019.

Keywords: *Government of the Republic of Indonesia, Rohingya Ethnicity, Foreign Aid*

PENDAHULUAN

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar (Driss, 2012). Etnis Rohingya merupakan bagian dari negara bagian Rakhine, Myanmar. Rakhine yang dahulunya disebut sebagai Arakan, kemudian mengalami invasi yang dilakukan oleh orang-orang dari etnis Burma dan akhirnya negara bagian tersebut menjadi dikuasai oleh etnis Burma. Hal tersebut menjadi suatu faktor pendorong dari keminoritasan yang dimiliki oleh etnis Rohingya (Mohajan, 2019). Ditinjau dari historinya, ditemukan bahwasanya kemalangan etnis Muslim Rohingya di negara Myanmar diawali pada tahun 1784. Pada saat itu, provinsi Rakhine yang dipimpin oleh Raja Buddha menganeksasi kawasan Rakhine ke Myanmar. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran mengenai penyebaran Islam di kawasan itu yang kemudian menjadikan kaum Buddha Burma (Myanmar) melakukan penindasan kepada etnis muslim Rohingya (Driss, 2012).

Mayoritas dari etnis Rohingya tidak mendapatkan status kewarganegaraan dari negaranya sendiri, yakni Myanmar. Perangkat hukum yang paling berperan di belakang situasi tak diakuinya kewarganegaraan etnis Rohingya adalah undang-undang tahun 1982 mengenai Kewarganegaraan Myanmar. Undang-Undang yang mereka buat ini merupakan peraturan yang secara spesifik menjadikan etnis Rohingya sebagai target mereka. Dengan adanya undang-undang mengenai kewarganegaraan ini membuat diskriminasi yang terjadi pada warga etnis Rohingya sendiri kian parah (Susetyo et al., 2016).

Dengan situasi tak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingya telah memperkuat pendapat negara bahwasanya etnis tersebut hanyalah orang asing atau yang menurut pemerintahan Myanmar, mereka disebut sebagai imigran gelap yang tidak pantas untuk diberikan perlindungan oleh Myanmar. Akibat hal-hal tersebutlah, mayoritas etnis Rohingya dengan sah ditetapkan sebagai bukan penduduk negara Myanmar, melainkan etnis Rohingya merupakan warga asing. Selain itu, etnis ini juga dianggap sebagai komunitas yang tidak mempunyai histori maupun relasi dengan negara Myanmar dan justru etnis Rohingya disebut sebagai orang Bengali (Chickera, 2021).

Dampak dari penindasan dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia pada etnis Rohingya menjadikan mayoritas etnis tersebut dengan terpaksa harus meninggalkan negaranya dan bermigrasi ke negara lainnya. Hal ini sendiri telah membuat warga Rohingya menetap di negara orang lain sebagai pengungsi. Mayoritas dari pengungsi Rohingya telah memilih Bangladesh sebagai negara untuk bermigrasi karena jarak antara Bangladesh-Myanmar tidak terlalu jauh sehingga para pengungsi banyak yang berdatangan ke negara tersebut (Faye, 2021). Selain Bangladesh, pengungsi Rohingya beberapa diantaranya melarikan diri ke negara tetangga, salah satunya adalah Indonesia. Di tahun 2009, sejumlah pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui beberapa kali gelombang. Gelombang pertama terdapat di bulan Januari 2009 yang membawa sebesar 193 pengungsi Rohingya datang melalui Sabang, Malaysia ke Indonesia. Selanjutnya, gelombang kedua terdapat di bulan Februari 2009,

dimana sebanyak 198 pengungsi etnis tersebut ditemukan terdampar di laut lepas Indirayo, Aceh Timur. Kemudian di tahun 2015, sekiranya terdapat 1.800 warga Rohingya dan pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang secara berangsur-angsur datang ke lautan Indonesia melewati Aceh (Sari et al., 2018).

Indonesia juga turut memberikan bantuan lainnya kepada Rohingya. Tak hanya sekadar menampung serta menangani para pengungsi Rohingya saja, melainkan Indonesia juga memberikan bantuan internasional kepada Rohingya. Hal ini Indonesia lakukan didasari oleh adanya fakta bahwa terdapat sejumlah pengungsi Rohingya yang melakukan migrasi ke Indonesia demi mendapatkan kemanusiaan dan perlindungan dari Indonesia serta fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang populasi penduduk muslimnya paling besar di dunia, sebagaimana mayoritas etnis Rohingya merupakan penganut agama Islam. Maka dari itu, Indonesia sangat memberikan perhatian kepada kasus Rohingya ini bahkan mengirimkan cukup banyak bantuan kemanusiaan kepada etnis tersebut. Bantuan-bantuan tersebut telah diberikan oleh Indonesia dari tahun 2012. Bantuan ini sendiri berlanjut hingga ke era kepemimpinan Joko Widodo. Bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia kepada etnis Rohingya sendiri berupa bantuan kemanusiaan, pembangunan dan diplomatik. Pada tahun 2017, Indonesia memberikan sejumlah program untuk Myanmar yang direkomendasikan oleh Presiden Republik Indonesia, yang diantaranya adalah pendirian rumah sakit untuk warga Rakhine, pendirian sekolah bagi warga Myanmar terkhususnya untuk sejumlah pengungsi Rohingya di Rakhine dan membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan rumah sakit tersebut agar warga Rohingya dapat bekerja di rumah sakit itu ataupun menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah sakit (Saputra, 2020).

Pada tahun 2015, DPR Republik Indonesia sempat mengungkapkan bahwa mereka memperkenankan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu warga Rohingya khususnya untuk warga yang berlokasi di tempat pengungsian Myanmar dan turut menerima saran-saran yang diberikan oleh lembaga-lembaga kepada pemerintah. Lembaga-lembaga itu juga mengabarkan bahwa mereka akan menyelenggarakan diskusi internasional terkait etnis Rohingya (Komisi I DPR RI, 2015).

Selanjutnya, pada sebuah kesempatan di tahun 2017, Indonesia kembali mengirimkan berbagai bantuannya yang berisikan kebutuhan pokok para pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Bantuan itu sendiri berupa tenda tempat pengungsi tinggal, makanan serta pakaian. Pada kesempatan ini juga, Joko Widodo selaku pemimpin negara Indonesia menyampaikan bahwa bantuan tersebut bisa diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dikarenakan adanya pengutusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk berkomunikasi bersama pihak Bangladesh dan juga pihak Myanmar, yang mana pada hal ini ketiga negara tersebut berdiskusi terkait bantuan luar negeri yang dibutuhkan oleh para etnis Rohingya (Tisnadibrata, 2017).

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada era pertama Joko Widodo ini sendiri meningkat intensitasnya dari yang sebelumnya. Kemudian, apabila ditelaah kembali pemerintah Republik Indonesia dalam membantu Rohingya pada era tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan era pemerintah yang sebelumnya, dimana pada era Joko Widodo, mereka lebih bergerak aktif dalam menangani kasus Rohingya tersebut. Hal ini sendiri didukung dengan

adanya sejumlah tindakan yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia di era tersebut, beberapa diantaranya adalah pemerintah Republik Indonesia kerap kali mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rangka membantu Rohingya, seperti melakukan dialog dengan pihak dari pemerintah Myanmar agar mereka dapat mengakhiri dan meminimalisir adanya pelanggaran HAM atau penindasan yang terjadi pada warga Rohingya serta menteri luar negeri juga diminta untuk dapat berdialog dengan Myanmar agar mereka mau memberikan proteksinya kepada seluruh warganya tak terkecuali etnis Rohingya. Pemerintah Republik Indonesia juga memerintahkan Retno Marsudi selaku menteri luar negeri untuk bernegosiasi dengan Myanmar agar mereka dapat membuka akses bantuan kepada penduduk Rohingya yang sempat mereka blokir (BBC News Indonesia, 2017a). Tak hanya itu, pemerintah Republik Indonesia juga sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Pada Januari-Februari tahun 2017, pemerintah Republik Indonesia menyumbangkan bantuan medis dan makanan sejumlah sepuluh kontainer, hingga mendirikan rumah sakit pada negara bagian Rakhine (Waluyo, 2017a).

Pemerintah juga memberikan bantuan kemanusiaannya hingga ke titik pusat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bantuan tersebut berupa makanan instan, beras, pakaian, dan lain-lain. Hal ini sendiri dapat dilakukan setelah adanya dialog antara perwakilan negara Myanmar dan Bangladesh dengan Menteri Luar Negeri Indonesia (Waluyo, 2017b). Usaha pemerintah Republik Indonesia dalam membantu Rohingya semakin terlihat dengan adanya tindakan pembukaan akses penanam modal asing dari Indonesia kepada Myanmar. Dari adanya upaya dan usaha yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo, maka dikatakan pemerintah tersebut lebih aktif dalam menangani kasus Rohingya, sebagaimana pula pemerintah Republik Indonesia menuangkan segala keseriusannya melalui berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menolong etnis tersebut (Saputra, 2020). Sedangkan, di era pemerintah Republik Indonesia sebelumnya ditemukan fakta bahwa pemerintah tersebut tidak mengimplementasikan kebijakan yang teguh dan koheren pada penanganan kasus etnis Rohingya. Hal tersebut didukung dengan tak adanya fakta mengenai usaha nyata presiden sebelumnya dalam menangani peristiwa kemanusiaan baik di tingkat kawasan yakni ASEAN maupun di tingkat global yakni PBB. Yang didapati pada pemerintah tersebut adalah kebijakan yang senyap dimana mereka tidak bergerak secara aktif dalam mendorong etnis Rohingya (Nurhandayani, 2013).

Melalui pembahasan di atas, terdapat beberapa faktor yang membuat pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo selaku pemimpin negara memberikan bantuan luar negerinya sendiri pada etnis Rohingya terutama mengenai fakta bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi undang-undangnya yang berlandaskan atas perdamaian, keadilan sosial dan ketertiban dunia. Melalui hal-hal tersebut terdapat suatu jembatan yang menghubungkan antara kekerasan yang dialami etnis Rohingya dengan pemberian bantuan luar negeri pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo kepada etnis Rohingya. Kemudian, dari yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa perbedaan yang lumayan kentara antara pemerintah Republik Indonesia di era Joko Widodo seperti aktifnya bantuan yang pemerintah tersebut berikan kepada etnis itu sendiri hingga mengirim Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar untuk melakukan dialog, sementara pada pemerintah yang sebelumnya tidak ditemukan fakta dalam

menangani kasus kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Dengan adanya fakta-fakta yang termuat di atas menjadikan pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo memperoleh banyak apresiasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori bantuan luar negeri yang berfokus pada indikator tujuan bantuan luar negeri yang dikirimkan oleh negara pendonor kepada negara penerima untuk dapat membantu menjawab pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memperoleh sejumlah informasi bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo serta alasan pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada etnis Rohingya di era Joko Widodo serta faktor yang menjadikan pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo tersebut mendapatkan banyak apresiasi maupun pujian dan menjadi pemerintah Republik Indonesia yang lebih aktif pada kasus Rohingya tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dimana etnis Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim di Myanmar yang banyak mengalami penindasan bahkan hingga tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dari negaranya sendiri akibat sejarah yang mereka miliki. Maka dari itu, beberapa negara menaruh atensinya pada kasus ini, salah satunya Indonesia selaku negara yang bermayoritaskan penduduk muslim dan menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat mengungsi oleh pengungsi Rohingya. Indonesia sendiri sudah sejak lama menyalurkan bantuan luar negerinya, akan tetapi pada pemerintah Republik Indonesia era Joko Widodo, Indonesia dikatakan sebagai pemerintah yang memperlihatkan intensitas aktifnya dalam membantu etnis Rohingya ini sendiri. Sebagaimana hal ini juga, berangkat dari penelitian terdahulu yang mana pada penelitian-penelitian tersebut belum ada peneliti yang menyoroti keaktifan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada era Joko Widodo melalui bantuannya pada Rohingya, maka dari itu peneliti berupaya untuk menyoroti hal tersebut di penelitian ini, sehingga memunculkan rumusan masalah sebagai: Bagaimana bantuan luar negeri pemerintah RI pada era Joko Widodo yang diberikan kepada etnis Rohingya?

METODE PENELITIAN

Tipe metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan peristiwa kasus etnis Rohingya secara jelas dan detail serta penulis juga ingin memahami lebih lanjut mengenai peristiwa yang tengah berlangsung tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, penulis ingin mendeskripsikan bantuan luar negeri yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada etnis Rohingya di era pertama Joko Widodo secara objektif, cermat dan juga logis. Penelitian kualitatif deskriptif ini juga dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang muncul.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini sendiri adalah data sekunder, yang mana penulis mengambilnya dari beberapa sumber, diantaranya laman resmi Setkab Republik Indonesia, Kominfo, DPR Republik Indonesia dan juga beberapa laman portal berita Deutsche Welle, Antara News, VOA, BBC. Penulis juga menggunakan metode triangulasi data pada penelitiannya. Sebagaimana, triangulasi data itu sendiri merupakan

pemanfaatan lebih dari satu sumber data dalam menganalisis suatu peristiwa. Triangulasi ini sendiri mengacu pada beberapa sumber data yang fokusnya mengarah pada metode analisis dan sumber data (Bryman, 2012).

PEMBAHASAN

Konflik pada etnis Rohingya telah berlangsung sangat lama, bahkan dari sejarah Myanmar di masa lampau konflik Rohingya ini telah berlangsung. Faktor konflik Rohingya ini sendiri telah menjadi kompleks dimana banyak sekali hal yang menyebabkan konflik ini terjadi. Konflik Rohingya disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik serta agama (Prabowo, 2020). Etnis ini mempunyai status kewarganegaraan berbeda dari etnis atau masyarakat lainnya atau dapat dikatakan bahwa masyarakat etnis ini tidak mendapatkan status kewarganegaraan dimana seperti yang telah tercantum pada Undang Undang tahun 1982 mengenai Kewarganegaraan Myanmar (Susetyo et al., 2016). Kemudian, masyarakat etnis ini juga dianggap sebagai pengungsi ilegal yang berasal dari Bangladesh (Prabowo, 2020). Pada saat itu, komunitas Buddhis selaku kelompok penganut agama Buddha, mayoritas dari mereka tidak menerima akan sebutan Rohingya itu sendiri. Buddhis justru memanggil mereka sebagai kaum Bengali serta berpendapat bahwa Rohingya merupakan pengungsi ilegal yang berasal dari negara Bangladesh. Untuk pertama kalinya, pada saat itu, dalam 30 tahun terakhir, Myanmar menjalankan sensus di tahun 2014 dan menentukan keputusan dalam waktu sebelas jam yang berisi bahwa mereka tidak akan menganggap orang yang memperkenalkan dirinya sebagai etnis Rohingya, serta hanya mau merespon orang-orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Bengali (Chan, 2022). Masyarakat Rohingya juga cukup sering mendapatkan kebijakan yang tidak adil dari negaranya sendiri. Hal ini sendiri ditunjukkan melalui adanya kewenangan yang dikeluarkan oleh pihak Myanmar seperti merampas tanah kepemilikan warga Rohingya untuk disita dan digunakan untuk mendirikan permukiman warga yang menganut agama Buddha (Prabowo, 2020).

Terdapat dua kejadian yang menjadi situasi terparah yang pernah dialami oleh etnis Rohingya. Kejadian yang pertama, di tahun 2012 dimana situasi konflik Rohingya ini kian rumit dan berbahaya. Di tahun ini, terhitung ada sekitar 5.338 tempat tinggal warga Rohingya yang terbakar habis, 123 warga Rohingya yang mengalami luka-luka, 98 warga Rohingya meninggal karena dibunuh serta terdapat 75.000 warga yang bermigrasi (Dewi, 2022). Hal itu sendiri disebabkan oleh terdapatnya pembakaran dengan skala besar pada permukiman warga Rohingya. Selain itu juga, muncul asumsi bahwa pasukan polisi dan tentara negara Myanmar melakukan penghasutan kepada masyarakat Myanmar agar kawasan permukiman etnis Rohingya dapat diserang oleh mereka (Triono, 2014). Selanjutnya, kejadian yang kedua, ada di tahun 2017 dimana angkatan militer negara Myanmar menjalankan tindakan pembersihan etnis pada kaum Rohingya. Pada kejadian ini, angkatan militer tersebut mengusir secara paksa masyarakat Rohingya yang berada di Rakhine yang kemudian membuat para masyarakat tersebut bermigrasi ke sejumlah negara yang berada pada kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara (Prabowo, 2020).

Penindasan yang dialami pada etnis ini sendiri mengacu ke suatu jenis kejahatan, yaitu genosida. Hal ini sendiri ditunjukkan oleh Operation Naga Min 1978

yang merupakan kelompok operasi militer dimana mereka berusaha untuk mengusir warga Rohingya dengan tujuan untuk membersihkan etnis Rohingya itu dari negara Myanmar. Hal tersebut juga menyebabkan setidaknya terdapat lebih dari 200 ribu kabur menuju negara Bangladesh. Sejak masyarakat Rohingya ini tidak mendapatkan status kewarganegaraan dari negaranya sendiri, mereka kerap kali mengalami penindasan serta disandera. Selain itu, dengan banyaknya penindasan Hak Asasi Manusia yang warga etnis Rohingya dapatkan, menjadikan warga-warga ini sendiri kabur ke beberapa negara tetangganya, misalnya Indonesia, Thailand, Malaysia dan juga India. Hal ini mereka lakukan agar warga Rohingya dapat menyelamatkan diri di beberapa negara tersebut (Gischa, 2022).

Isu konflik yang dialami oleh Rohingya ini telah menjadi sorotan dunia dimana pada tahun 2012 banyak masalah bermunculan terkait dengan penindasan dan juga penindasan yang dialami oleh etnis itu sendiri meledak di tahun 2017 sehingga banyak warga dunia yang mengikuti berita konflik Rohingya tersebut. Hal ini tak luput dari negara Indonesia yang ikut membantu dalam memberikan bantuannya kepada etnis Rohingya. Indonesia berorientasi dalam meminimalisir penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya dan juga berorientasi untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu etnis tersebut (Setiawan & Hamka, 2020). Indonesia sendiri dalam urusan bantuan yang diberikannya kepada Rohingya dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini sendiri dinyatakan langsung oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI di laman daringnya bahwa mereka mengizinkan sejumlah LSM untuk ikut serta membantu Rohingya, selain itu komisi ini juga memperbolehkan LSM itu sendiri untuk memberikan mereka saran mengenai bantuan luar negeri Indonesia untuk Rohingya. Pada hal ini juga dikatakan bahwa kolaborasi yang ada pada unit masyarakat Indonesia terbilang lumayan efektif (Komisi I DPR RI, 2015). Selanjutnya, bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia kepada etnis Rohingya tersebut mencakup 3 tujuan pokok berdasarkan atas teori bantuan luar negeri, yakni kemanusiaan, pembangunan dan diplomatik.

BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA TUJUAN KEMANUSIAAN

Pada bantuan luar negeri yang bertujuan terkait kemanusiaan, hal yang biasanya membuat suatu negara memberikan bantuannya dikarenakan adanya suatu bencana alam maupun bencana buatan manusia. Bencana-bencana tersebut kerap menyebabkan banyaknya korban berjatuhan, terkadang pula menyebabkan adanya imigran dalam negeri maupun imigran yang bermigrasi ke luar negeri. Pihak negara terbelakang kerap pula kurang terpenuhi sumber dayanya ataupun kapabilitas dalam memenuhi keperluan korban yang mengalami bencana tersebut. Pada hal ini sendiri, umumnya lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada perbaikan dan pembenahan akan menyalurkan bantuannya. Mayoritas bantuan-bantuan tersebut difasilitasi oleh sejumlah negara yang merasa mampu untuk menyalurkan bantuan (Lancaster, 2007).

Mengacu dari penjelasan di atas, pada tahun 2016, pemerintah Indonesia sempat mengirimkan beberapa bantuan kepada etnis Rohingya yang berjumlah sepuluh kontainer (Azizah, 2017). Bantuan itu sendiri terdiri atas baju, makanan bayi dan makanan instan. Bantuan-bantuan tersebut dikirimkan sesudah adanya dialog antara

pihak negara Myanmar dan menlu Indonesia, yaitu pemimpin negara Myanmar pada saat itu, Aung San Suu Kyi dan Retno Marsudi. Bantuan ini sendiri dibawa untuk disalurkan ke kawasan negara bagian Rakhine. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar bantuan ini sendiri dapat diterima sebagai wujud iktikad baik pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung terealisasinya keamanan, perdamaian serta kestabilan kawasan Rakhine, Myanmar. Selain itu juga, pemerintah Republik Indonesia turut menekankan bahwa dibutuhkan adanya pengukuhan hak asasi manusia dan menghargai kelompok muslim (Deutsche Welle, 2016). Bantuan tersebut dikirimkan langsung dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta. Presiden Joko Widodo bahkan turut hadir dalam kegiatan pemberangkatan bantuan-bantuan tersebut. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan harapannya, yaitu beliau sangat mengharapkan agar warga minoritas etnis Rohingya yang berada di kawasan Rakhine bisa mendapatkan ketenteraman melalui beragam usaha yang sudah dan akan dilanjutkan terus-menerus oleh Indonesia kepada etnis Rohingya (Purwanto, 2016).

Selain itu, di beberapa kesempatan juga Indonesia mengirimkan bantuan-bantuan yang amat dibutuhkan oleh para korban penindasan konflik Rohingya. Bantuan yang kali ini disalurkan oleh pemerintah Republik Indonesia diberikan dengan cara bertahap yang mana bantuan yang dikirimkan pada kali ini merupakan bantuan gelombang pertama pemerintah Republik Indonesia kepada Rohingya. Bantuan-bantuan itu berupa makanan instan, selimut, beras, *family kit*, baju anak-anak, barak pengungsi dan juga bak air. Bantuan ini dikirimkan oleh Indonesia menggunakan 4 pesawat *Hercules*. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo selaku pemimpin negara dan perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa seluruh bantuan tersebut dapat terealisasikan karena adanya usaha diplomasi yang dilaksanakan oleh negara Indonesia dengan negara Myanmar dan juga Bangladesh. Bantuan tersebut disalurkan kepada pengungsi Rohingya yang terdapat di perbatasan kawasan Myanmar dan Bangladesh. Tidak hanya menyalurkan bantuan saja, akan tetapi pemerintah Indonesia turut mengajak negara lainnya untuk dapat turut terlibat dalam menyalurkan bantuan kepada etnis Rohingya. Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya dalam menolong Rohingya melalui bantuan luar negeri dengan tujuan kemanusiaan itu sendiri. (Deutsche Welle, 2017).

Indonesia juga memperlihatkan responsibilitasnya dalam memberikan bantuan kepada sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Rakhine, Myanmar. Bantuan itu sendiri diperlihatkan Indonesia melalui pengiriman 2 pesawat *Hercules*nya yang mengangkut bantuan-bantuan kemanusiaannya berupa sarung, makanan instan, pakaian seperti sarung, makanan khusus untuk ibu hamil serta bayi dan sebagainya. Kemudian, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengirimkan bantuan lainnya seperti obat medis bertotalkan satu ton untuk sejumlah pengungsi Rohingya. Bantuan ini sendiri disalurkan langsung ke Myanmar, berbeda dari bantuan gelombang pertama yang disalurkan ke perbatasan kawasan Myanmar dan Bangladesh. (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2017).

Selanjutnya, Indonesia juga turut menyalurkan bantuannya untuk sejumlah pengungsi yang berada di Bangladesh. Jumlah bantuan yang diberikan Indonesia sendiri sebanyak 74 ton (Ivon, 2017). Pesawat yang menampung semua bantuan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh tersebut tiba di daerah Chittagong, Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh dan juga Rina Soemarno selaku Duta Besar Indonesia di Bangladesh yang menerima bantuan-bantuan itu sendiri. Duta Besar Indonesia tersebut segera memberikan bantuan itu ke Md Zillur Rahman Chowdhury selaku Komisaris Distrik Chittagong yang memang ikut bersamaan dengan dirinya ke bandara tempat bantuan dari Indonesia itu tiba. Bantuan-bantuan ini juga langsung diberikan ke seluruh pengungsi Rohingya yang ketika itu tengah bermukim di Cox's Bazar City, Bangladesh dimana kawasan tersebut paling berdekatan dengan daerah Chittagong, Bangladesh. Tempat pengungsian darurat di Cox's Bazar itu sendiri telah menampung para pengungsi yang sudah lewat dari daya tampung yang seharusnya. Pengungsi-pengungsi itu juga hanya disokong oleh tenda yang terbuat dari bambu yang mana dapat rusak kapan saja dan sangat rawan akan hujan serta hembusan angin. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memberikan tenda pengungsian di dalam bantuan yang dikirimkannya (Tempo, 2017).

Bantuan-bantuan itu sendiri sampai di bandara Chittagong, Bangladesh dengan bertahap. Terhitung, per tanggal 16 September 2017, pemerintah telah memberikan bantuan sebanyak 54 ton yang terdapat 14.000 selimut, 30 ton beras, 20 buah tenda-tenda besar sebagai tempat tinggal, 2.004 buah makanan instan, 1 ton gula, 900 buah baju dan juga 10 unit bak air (BBC News Indonesia, 2017b). Kemudian, melihat dari apa yang telah menimpa para korban itu sendiri, Indonesia juga menyalurkan bantuan berupa bimbingan konseling bagi para warga Rohingya yang mempunyai trauma akibat penindasan yang didapatkan dari negaranya tersebut (Azizah, 2017).

Selanjutnya, pada tahun tersebut juga pemimpin negara Indonesia – Joko Widodo sempat mengunjungi sejumlah pengungsi yang berasal dari kawasan Rakhine, Myanmar di barak pengungsian Jamtoli, Cox's Bazar, Bangladesh. Pemimpin negara Indonesia tersebut menyatakan pujiannya terhadap pemerintah Bangladesh yang dengan baik hati mau mengizinkan sejumlah pengungsi untuk dapat mengungsi di negara Bangladesh. Selain itu, pemimpin negara Indonesia ini juga menyampaikan rasa syukurnya terhadap warga serta lembaga kemanusiaan Indonesia yang berkenan untuk berpartisipasi pada penganggulan pengungsi Rohingya. Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaannya kembali seperti tempat penampungan, program pemulihan trauma, pusat pendidikan, solar panel serta pembersih air. Pada kegiatan pengunjungan ini juga, presiden Indonesia tersebut bersilaturahmi dengan tiga puluh orang yang mengungsi pada barak tersebut. Kemudian, beliau juga menyalurkan paket bantuan dari pemerintah Indonesia kepada pengungsi-pengungsi. Paket-paket tersebut mencakup selimut, sarung serta kebutuhan sekolah untuk para pengungsi yang berstatus sebagai pelajar (Nugroho, 2018).

Di tahun 2019, pemerintah Indonesia sempat menyalurkan bantuannya berupa bantuan dana sebesar 7.5 miliar dalam bentuk rupiah. Dana tersebut dijadikan bantuan dari pemerintah Indonesia untuk dapat mengembalikan sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh ke negara asal mereka, yaitu Myanmar tepatnya di negara bagian Rakhine (Leba, 2019). Bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk loyalitas pemerintah Indonesia pada permasalahan konflik Rohingya tersebut. Indonesia berharap bantuan yang diberikannya ini bisa menyokong prosedur pengembalian pengungsi tersebut ke negara asalnya yang mana sebelumnya sempat gagal 2 kali. Bantuan tersebut juga diberikan Indonesia melalui ASEAN dan ini adalah

bantuan yang pertama kali Indonesia berikan dalam hal pengembalian pengungsi Rohingya ke negaranya sendiri. Pada saat itu, bantuan ini sendiri ditandatangani dan disetujui oleh Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN dalam Hal Masyarakat dan Perusahaan, yaitu Robert Matheus Michael Tene dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu Luky Alfirman. Adapun dokumen yang ditandatangani adalah perjanjian bantuan diantara ASEAN dan Indonesia dalam pengimplementasian bantuan pengembalian pengungsi Rohingya (Leba, 2019).

Bantuan berupa dana ini juga dimaksudkan agar dapat menyokong tim khusus untuk meninjau pelaksanaan penilaian keperluan awal dalam pengembalian pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia sendiri berkeyakinan bahwa tim khusus tersebut dapat memperkuat tugas ASEAN dalam menyokong pengembalian pengungsi. Tim khusus itu sendiri dibuat oleh Sekretariat ASEAN dengan maksud agar dapat menolong pelaksanaan referensi penilaian kebutuhan awal dengan begitu pengembalian pengungsi sendiri dapat terlaksana dengan etis, ikhlas, terhormat dan tentram. Melalui laporan yang didapatkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tim khusus tersebut sempat datang ke Cox's Bazar, Bangladesh untuk melihat keadaan di sana (Leba, 2019).

Kala itu, terdapat kurang lebih 730 ribu masyarakat Rohingya yang tergusur dari negara bagian Rakhine, Myanmar yang mana mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi di Bangladesh. Usaha pengembalian pengungsi ini telah dicoba 2 kali. Pertama di bulan November tahun 2018 dan yang kedua di bulan Agustus 2019, keduanya tersebut gagal untuk terealisasikan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya pengungsi-pengungsi Rohingya yang keberatan akibat masih mencemaskan sekuritas pada daerah Rakhine. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yakni Jose Antonio Morato Tavares sempat menyampaikan bahwa pada tahun 2019 terdapat 414 warga Rohingya yang sudah pulang ke negara asalnya dengan mandiri. Pemerintah Indonesia berjanji untuk menolong operasi pengembalian pengungsi dapat terlaksana secepatnya dari adanya kegagalan yang sempat dialami, akan tetapi semuanya tetap tergantung pada kehendak dari para pengungsi itu sendiri (Leba, 2019).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga sempat menambahkan bahwa penyebaran informasi merupakan hal yang krusial untuk dilakukan agar dapat menciptakan keyakinan dari para pengungsi yang bermukim di Cox's Bazar itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi Myanmar untuk dapat melakukan dialog dan berkomunikasi bersama para pengungsi dalam memberikan informasi mengenai pengembalian pengungsi tersebut. Indonesia sendiri dapat mengirimkan bentuk bantuan luar negerinya kepada Rohingya tersebut berkat hubungan negara Indonesia dan Myanmar yang cukup baik (Leba, 2019).

BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA TUJUAN PEMBANGUNAN

Pada bantuan luar negeri yang bertujuan akan pembangunan, hal ini sendiri mendorong adanya pertumbuhan sosial dan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan yang mana hal-hal tersebut tidak hanya menjadi tujuan kebijakan saja melainkan menjadi instrumen dari bantuan luar negeri juga. Selain itu, tujuan akhir dari

pembangunan ini sendiri adalah untuk mempromosikan pembangunan itu sendiri, yang mana hal ini dapat membenahi kehidupan para penduduk yang kurang baik di luar negeri, dapat dijadikan pula sebagai gambaran dari nilai altruisme, keadilan sosial serta kesetiakawanan dunia internasional (Lancaster, 2007).

Pada bantuan luar negeri terkait pembangunan, Indonesia sendiri berharap bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh mereka tersebut dapat meringankan beban pihak-pihak yang terkena dampak dari kasus Rohingya tersebut. Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014 yang lalu sempat mendirikan sekolah yang telah disahkan oleh Abdurrahman Mohammad Fachir selaku Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, total terdapat 4 sekolah yang didirikan pada kawasan Rakhine itu sendiri (Santi, 2014).

Pada kegiatan pengesahan sekolah tersebut, Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar, Ito Sumardi ikut mengahdirinya bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia. Selain itu juga, ada beberapa petinggi lainnya yang mengahdiri kegiatan pengesahan sekolah ini, diantaranya Menteri Perbatasan Myanmar, Ketua Menteri Rakhine, serta representatif dari beberapa badan PBB yang berlokasi di negara Myanmar. Mochammad Fachir menyampaikan pula bahwa bantuan berupa pendirian 4 sekolah ini untuk memperlihatkan keaktifan negara Indonesia dalam memajukan perdamaian untuk permasalahan yang ada pada kawasan Rakhine tersebut melalui bantuan kemanusiaan yang diberikannya. Selain itu, beberapa sekolah tersebut didirikan melalui anggaran sebesar 1 juta dollar Amerika Serikat. Kemudian, pemerintahan negara Myanmar juga turut memberikan ucapan terima kasihnya melalui Kepala Menteri Rakhine terhadap warga serta pemerintahan negara Indonesia yang sudah berpartisipasi pada operasi penanganan kasus komunal di kawasan Rakhine dengan bantuan kemanusiaannya. Tak hanya itu, negara Indonesia menunjukkan prioritasnya dalam memajukan pendekatan pembangunan untuk Myanmar dengan membagikan wawasannya dan menyalurkan bantuannya (Santi, 2014).

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil merancang pendirian rumah sakit yang berlokasi pada Myaung Bway, Rakhine. Pada hal ini, KBRI Yangon juga ikut berperan dalam urusan perizinan terhadap pihak Myanmar. Bantuan ini sendiri merupakan bentuk persetujuan dari presiden negara Myanmar, Htin Kyaw serta Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Persetujuan ini diperoleh pada bulan Juli 2016 ketika kedua belah pihak bertemu di Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Europe Meeting* (KTT ASEM). Adanya pendirian rumah sakit tersebut juga dikontrol oleh beberapa pihak, yaitu KBRI Yangon, *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) dan Palang Merah Indonesia (PMI) (Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar, 2018).

Bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terdapat pada bidang mata pencaharian dengan menyediakan beberapa profesi seperti bekerja di rumah sakit yang telah dibangun oleh Indonesia di Rakhine ataupun bekerja menjadi kontraktor di rumah sakit tersebut. Hal ini dilakukan di tahun 2017 oleh Indonesia yang dimana bertujuan agar warga Rohingya dapat menjalankan hidupnya kembali melalui penghasilan yang diperolehnya pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Selain itu juga, hal ini dilakukan guna memajukan dan menolong perekonomian warga Rohingya (Saputra, 2020).

Kemudian, pada tahun 2018 juga telah terealisasi penempatan batu pertama untuk kegiatan pendirian sepuluh sekolah pada perkampungan yang ada di negara bagian Rakhine bagi masyarakat muslim serta Buddha. Operasi pendirian sekolah-sekolah tersebut dilaksanakan dengan bergelombang menyesuaikan pada persetujuan yang didapat dari lembaga lokal setempat dan pihak negara Myanmar (Sugesti, 2019).

Selanjutnya, di tahun 2019 Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar melaksanakan acara serah terima rumah sakit yang didirikan oleh Indonesia di Myaung Bwe sebagai bentuk bantuannya kepada Myanmar maupun etnis Rohingya. Rumah sakit tersebut diberikan melalui Wakil Direktur Jenderal Bagian Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan & Olahraga Negara Myanmar, Nay Pyi Taw. Acara serah terima teknis rumah sakit ini dihadiri oleh Myin Htwe, Menteri Kesehatan dan Olahraga Negara Myanmar dan representatif MER-C Indonesia dan PMI. Pendirian rumah sakit ini sendiri berlangsung selama dua tahun sepuluh bulan. Rumah sakit dari bantuan Indonesia tersebut terdapat gedung utama sebesar 2.214 m² pada tanah berukuran 4.644 m² yang meliputi ruang emergensi, kamar operasi, kamar X-Ray, dan sebagainya. Selain itu terdapat pula, gedung ruang jenazah 24 m², gedung generator sebesar 11,25 m² disertai 1 buah generator, gedung tangki air bawah tanah, dan lain-lain. Iza Fadri selaku duta besar Republik Indonesia mengatakan rumah sakit tersebut merupakan lambang pertemanan serta perdamaian dari Indonesia (Liputan 6, 2019).

BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PADA TUJUAN DIPLOMATIK

Pada bantuan luar negeri yang bertujuan diplomatik, hal tersebut umumnya mengimplikasikan keamanan seperti keamanan kawasan, nasional, internasional, pengendalian relasi antar pemerintah dan juga tujuan politik internasional. Bantuan diplomasi umumnya dipakai untuk meliputi seluruh variasi relasi diantara negara-negara, termasuk bantuan, pembangunan, campur tangan kemanusiaan, dan lain-lain. Bantuan sudah dipakai oleh mayoritas pihak penyalur bantuan untuk memastikan akses kepada aparat pihak penerima bantuan (Lancaster, 2007).

Pada bantuan luar negeri Indonesia terkait bantuan diplomatiknya, Indonesia kerap kali melakukan kunjungan untuk berdialog ataupun berdiskusi terkait kasus penindasan etnis Rohingya. Hal-hal tersebut, biasanya dilakukan Indonesia bersama dengan pihak negara Myanmar maupun pihak yang terlibat dengan etnis Rohingya itu sendiri. Pada tahun 2015, dimana ketika itu Indonesia yang sempat menolak kedatangan pengungsi-pengungsi dari Rohingya untuk bermigrasi di kawasan Indonesia menyebabkan Indonesia menerima banyak kritikan dari pihak nasional maupun internasional. Kemudian, akibat dari banyaknya kritikan yang didapatkan, akhirnya pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan konsultasi yang diikuti oleh sejumlah menlu dari 3 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia. Selanjutnya pada 18 Mei 2015, alhasil pemerintah Indonesia mengumumkan persetujuannya untuk memberikan izin pada sejumlah pengungsi Rohingya yang akhirnya pengungsi-pengungsi tersebut diperbolehkan untuk menempati kawasan Indonesia dalam jangka waktu sementara (Moy & Kusuma, 2016).

Pada perihal pengungsi Rohingya tersebut pemerintah juga bahkan turut mendorong negara lainnya untuk ikut serta dalam menolong sejumlah pengungsi dari

Rohingya dikarenakan persoalan pengungsi Rohingya tersebut telah menjadi persoalan kawasan yang perlu didiskusikan bersama negara yang berada di Asia Tenggara dan juga negara Internasional lainnya (Moy & Kusuma, 2016).

Pada pertengahan tahun 2016, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia – Retno Marsudi mendatangi negara Myanmar untuk dapat melaksanakan dialog bersama Penasihat Negara Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi dan Komandan Golongan Bersenjata Negara Myanmar, Jenderal U Min Aung Hlaing. Kemudian setelah ke Myanmar, Retno Marsudi meneruskan perjalanannya menuju Bangladesh. Hal ini dilakukan agar perwakilan pemerintah Indonesia dapat berdiskusi mengenai penanggulangan pengungsi asal Rohingya. Retno Marsudi sendiri menyelenggarakan diskusi tersebut bersama pihak IOM, UNHCR serta Menteri Luar Negeri Bangladesh. Pada diskusi tersebut, beberapa pihak yang terlibat itu membicarakan terkait perkembangan dari usaha penanggulangan pengungsi dan juga menyampaikan informasi bahwasanya pemerintah Myanmar telah memperbolehkan adanya penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Selain itu juga, Retno Marsudi menyampaikan bahwa terdapat banyak kelompok yang hendak berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Rohingya yang mengalami krisis kemanusiaan di Rakhine dan yang mengungsi di kawasan Bangladesh (Alam & Purwanto, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2016 juga pemimpin negara Indonesia, Joko Widodo sempat mengutarakan harapannya terkait bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak negara Indonesia bisa diterima dengan sebaik mungkin karena bantuan-bantuan ini merupakan salah satu bentuk simpati dari Indonesia untuk Rohingya. Penyaluran bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia ini sendiri merupakan salah satu bentuk praktik diplomasi dari Indonesia dan juga merupakan bukti konkret dari simpati negara Indonesia untuk warga Rohingya (Purwanto, 2016).

Kemudian, di akhir tahun 2016, pemerintah RI mengutus menteri luar negerinya, yakni Retno Marsudi untuk datang ke Nay Pyi Taw dalam rangka menemui Aung San Suu Kyi kembali. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyampaikan terkait perhatian Indonesia pada penindasan yang dialami oleh Rohingya dan ketersediaan Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaannya kepada Rohingya (IPAC, 2018). Selain itu juga, Retno Marsudi menyarankan agar pemerintah Myanmar dengan pemerintah Indonesia dapat menjalin komunikasi antar agama yang mana pihak Myanmar dan Indonesia akhirnya setuju untuk menyelenggarakan komunikasi antar agama tersebut (Tribun Jambi, 2016).

Selanjutnya di tahun 2017, topik mengenai Rohingya ini juga dibahas di dalam Bali Democracy Forum yang ke 10 (IPAC, 2018). Yang mana, negara Myanmar sendiri mendatangi forum tersebut sebagai salah satu bentuk terima kasih pemerintah Myanmar terkait bantuan luar negeri yang selama ini diberikan kepada mereka khususnya etnis Rohingya oleh pemerintah Indonesia. Pada kesempatan ini juga, perwakilan negara Myanmar, Thaung Tun, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah bekerja dengan amat aktif dalam menolong Myanmar. Selain itu, Thaung Tun juga menyampaikan bahwa pihak mereka menghargai upaya pemerintah Indonesia dalam mendirikan sarana medis di negara bagian Rakhine (Maharani, 2017). Setelah itu, Retno Marsudi juga sempat menyelenggarakan lagi dialog bilateral bersama Aung San Suu Kyi. Retno Marsudi menyarankan agar pemerintah Myanmar dapat menjadi tuan rumah

dari kegiatan Retret Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, Myanmar. Saran tersebut kemudian disepakati oleh Aung San Suu Kyi agar kegiatan itu dapat dijadikan sebagai ajang tidak resmi untuk para anggota negara ASEAN dalam menunjukkan perhatiannya pada penindasan Rohingya yang tengah terjadi (IPAC, 2018).

Selain itu juga, pada tahun 2017, pemberian bantuan untuk pengungsi-pengungsi Rohingya bisa disalurkan ke Bangladesh dan perbatasan Myanmar dikarenakan adanya utusan dari pemerintah RI yang mengirimkan Menteri Luar Negeri mereka untuk dapat melakukan dialog bersama dengan pihak negara Bangladesh dan pihak negara Myanmar terkait bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi tersebut. Setelah diadakannya dialog tersebut, Retno Marsudi mengatakan bahwa mereka sempat menunggu pihak negara Myanmar mengirimkan daftar bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga etnis Rohingya itu sendiri. Kemudian, Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa pemerintah RI telah melaksanakan diskusi sebanyak 2 kali bersama pihak negara Myanmar dalam urusan daftar bantuan yang dibutuhkan oleh warga etnis tersebut. Selanjutnya, apabila daftar bantuan tersebut telah sampai ke tangan pihak pemerintah RI, mereka akan memberikan bantuan luar negeri tersebut secepatnya (Tisnadibrata, 2017). Kemudian, perwakilan pemerintah RI – Jusuf Kalla juga sempat menghadiri sidang *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) di negara Kazakhstan yang mana pada kesempatan tersebut pemerintah RI sempat menyampaikan terkait komitmen serta kesediaannya dalam memberikan bantuan kepada Myanmar dalam konteks kasus etnis Rohingya (Deutsche Welle, 2017).

Negara Myanmar sendiri sempat hanya berkenan menerima bantuan dari Indonesia saja (Taufiqqurahman, 2017). Hal ini disebabkan oleh hubungan baik yang dimiliki Indonesia bersama Myanmar. Hubungan yang dimiliki Myanmar dengan Indonesia sudah berlangsung dari 1947. Akan tetapi, hubungan diplomatik mereka baru diresmikan secara sah di tahun 1951, yang mana antara Indonesia dan Myanmar sama-sama mengikrarkan kedaulatan mereka tersebut. Selain itu, Myanmar sempat mendukung Indonesia pada saat Indonesia sedang menghadapi kasus mengenai pembebasan Irian Barat. Kedua negara ini juga merupakan sama-sama negara pelopor Asia Afrika. Hubungan dari negara Indonesia dan Myanmar sendiri banyak mengalami turun naik, namun walaupun begitu mereka tetap memiliki hubungan yang cukup baik selama 70 tahun (Permata et al., 2019). Melalui pemanfaatan hubungan kedua negara yang cukup baik inilah yang membuat Indonesia mempunyai kesempatan besar sebagai mediator pada kasus Rohingya dan dapat menyalurkan bantuannya kepada Rohingya. Tidak hanya itu, Indonesia juga dengan serius turut menjalin hubungan diplomatik bersama Myanmar pada pembahasan kasus muslim Rohingya (Azizah, 2017).

ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA ROHINGYA ERA PERTAMA JOKO WIDODO

Pemberian bantuan luar negeri Indonesia kepada etnis Rohingya seperti yang telah dideskripsikan di atas, tentu mempunyai alasan tersendiri di dalamnya. Bantuan luar negeri Indonesia pada kasus Rohingya ini berlandaskan atas HAM dan hakikat kemanusiaan yang mana hal ini adalah faktor utama dalam mendesak negara untuk mengeluarkan sikapnya guna menolong etnis tersebut. Dalam memberikan bantuan luar

negeri Indonesia kepada Rohingya banyak pula aspek yang dapat dijadikan sebagai faktor yang melatarbelakangi pemberian bantuan itu sendiri, beberapanya adalah faktor eksternal dan internal (Djumati et al., 2020).

Faktor eksternal mencakup seluruh situasi luar negeri yang mendesak suatu negara dalam mengeluarkan sikap politisnya sebagai tanggapan dari situasi itu. Sementara itu, faktor internal dipengaruhi oleh keperluan nasional, keamanan nasional, kepentingan nasional, serta personalitas dan kecondongan pemberian bantuan. Pada isu Rohingya, bantuan luar negeri Indonesia pada hakikatnya cenderung dilatarbelakangi dengan faktor internalnya, dimana pemerintah memperhitungkan keamanan nasional dan kepentingan nasional. Pada aspek keamanan nasional, Indonesia telah melakukan banyak usaha agar dapat menghindari seluruh dampak yang dapat hadir nantinya dalam berlangsungnya konflik Rohingya, dimana hal tersebut dapat membahayakan mayoritas negara pada wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahaya tersebut dapat berupa terorisme, adanya perdagangan manusia dan pengedaran narkoba. Apabila, bahaya yang dikhawatirkan itu benar-benar terjadi, maka hal tersebut bisa menghadirkan bermacam-macam permasalahan baru lainnya (Djumati et al., 2020).

Kemudian, pada aspek kepentingan nasional, warga Indonesia sangat mendesak negara agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan kasus Rohingya. Hal ini sendiri besar kemungkinannya dilandaskan atas fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, sebagaimana mayoritas etnis yang terlibat dalam penindasan kasus tersebut adalah etnis muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga Indonesia sangat tinggi tingkat solidaritasnya karena mereka tidak mau etnis itu terlibat semakin berlarut-larut di dalam permasalahan ini (Djumati et al., 2020).

Selain itu, pada faktor internal, Indonesia memberikan bantuannya juga dikarenakan adanya intensitas dari organisasi yang bergerak di bidang agama dan juga adanya tindakan demonstrasi dari warganya sendiri. Hal ini sendiri dilakukan oleh beberapa pihak itu sebagai bentuk simpati terhadap etnis Rohingya. Kemudian, pada faktor eksternalnya Indonesia memberikan bantuan pada Rohingya juga dikarenakan adanya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keadaan warga Rohingya itu sendiri dan bantuan yang dikirimkan oleh Indonesia kepada Turki membuat pemerintah Indonesia terdorong niatnya untuk menyalurkan bantuannya kepada Rohingya (Setiawan & Hamka, 2020).

Selanjutnya, pada Februari tahun 2018 silam dalam kegiatan Rapat Kerja Kepala Perwakilan, Presiden Indonesia Joko Widodo selaku representatif dari pemerintah RI sempat menyampaikan bahwasanya selaku negara besar kini waktunya negara Indonesia ikut serta dalam menolong sejumlah negara yang memerlukan pertolongan serta Indonesia senantiasa untuk tidak selalu ketergantungan dengan pertolongan dari negara lainnya. Kemudian, seperti yang telah tertulis pada undang-undang, pemerintah Republik Indonesia akan selalu berpartisipasi dengan aktif untuk memajukan usaha penanggulangan dan penuntasan pada krisis kemanusiaan internasional (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Lebih lanjut, Indonesia pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yang dimilikinya juga mengatur mengenai ketertiban dunia dimana hal ini terdapat pada alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 tersebut yang berbunyi sebagai “.... Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial,". Pada alinea 4 tersebut di dalamnya disinggung pula mengenai perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang mana hal tersebut juga telah dijadikan Indonesia sebagai latar belakang alasan pemerintahan turut aktif dalam membantu etnis Rohingya dalam belenggu kekerasan maupun pihak lainnya yang mengalami kekerasan. Kemudian, pada alinea ke 1 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Hal ini pula yang melatarbelakangi Indonesia dalam membantu etnis Rohingya guna menghapuskan penjajahan yang tidak sejalan dengan perikeadilan maupun perikemanusiaan tersebut (JDIH DPR RI, n.d.).

Selain itu, Indonesia juga mempunyai Peraturan Menteri Luar Negeri RI No 15 Tahun 2020 mengenai kebijakan pemberian bantuan ke lembaga internasional atau pemerintahan internasional dengan kurun waktu menengah. Pemberian bantuan internasional sendiri merupakan sebuah penerapan kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas-aktif, dimana hal ini berguna untuk memantapkan pencapaian NKRI seperti yang termuat pada pembukaan UUD RI 1945, yakni untuk mendukung kesejahteraan umum serta menjalankan ketertiban dunia yang berlandaskan atas perdamaian abadi, kemerdekaan serta keadilan sosial. Selama 10 tahun belakangan ini Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi yang diindikasikan melalui adanya kenaikan Produk Domestik Bruto dan juga kenaikan kedudukan Indonesia sebagai negara yang mempunyai penghasilan menengah. Hal-hal tersebut menghadirkan sikap tanggung jawab Indonesia agar dapat bergerak lebih banyak dalam memajukan kesejahteraan dan pembangunan dunia dengan memanfaatkan eksistensi kerjasama di bidang ekonomi serta pembangunan (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Kemajuan ekonomi Indonesia itu sendiri telah mengantarkan Indonesia pada pergantian kedudukan Indonesia, yang mana sebelumnya Indonesia hanyalah suatu negara yang menerima bantuan internasional, kemudian berganti menjadi negara pendonor bantuan internasional, seperti bantuannya yang diberikan pada Rohingya. Pada peraturan ini terdapat pula kebijakan pemberian bantuan untuk kawasan yang salah satunya adalah Asia Tenggara kawasan dimana Indonesia terletak. Asia Tenggara merupakan kawasan yang negara-negaranya terletak paling dekat dengan negara Indonesia dan juga menjadi target sasaran dari kebijakan maupun bantuan luar negeri Indonesia dalam beberapa waktu ini. Dalam hal ini, Indonesia sendiri dengan spesifik menegaskan bahwa prioritasnya dalam memberikan bantuan terhadap Asia Tenggara terdapat pada negara Myanmar, Laos, Vietnam dan Kamboja. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempercepat konsolidasi kawasan dengan sejumlah usaha yang diarahkan untuk meminimalisir kesenjangan perkembangan pada negara-negara kawasan Asia Tenggara (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pemerintah Indonesia sebelumnya sempat memberikan bantuan dana sebesar Rp. 7.5 miliar untuk pengembalian pengungsi Rohingya yang berlokasi di Cox's Bazar, Bangladesh ke negara asalnya, yakni Rakhine, Myanmar. Pemberian bantuan dana tersebut dilakukan Indonesia, salah satunya adalah sebagai manifestasi pelaksanaan janji Indonesia dalam mendorong pengembangan dan perdamaian dunia. Selain itu juga, pihak pemerintah Republik Indonesia sendiri mengamati pengungsi-pengungsi yang tengah mengalami kesulitan dalam 2 tahun pada tempat pengungsian. Kemudian, Retno

Marsudi menyampaikan bahwa hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia benar-benar melaksanakan seluruh janji dari perkataannya. Secara sederhananya, Indonesia bertanggungjawab dalam melaksanakan komitmen yang pernah diberikannya (Leba, 2019).

Selanjutnya, mengacu pada kebijakan luar negeri yang dimiliki Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia kepada masyarakat etnis Rohingya. Indonesia melakukannya atas dasar kebijakan luar negeri yang dimilikinya dimana kebijakan tersebut mempunyai prinsip bebas dan aktif. Kebijakan luar negeri Indonesia yang berprinsip ‘bebas’ memiliki definisi bahwa Indonesia tidak memihak kepada kekuasaan dunia atau pihak apapun dan siapapun itu. Sementara itu, Kebijakan luar negeri Indonesia yang berprinsip ‘aktif’ mempunyai definisi bahwa Indonesia turut berperan aktif dalam menangani isu atau kasus internasional seperti halnya persoalan konflik Rohingya ini sendiri. Kemudian, kebijakan bebas dan aktif Indonesia sendiri bukan merupakan sebuah kebijakan yang netral, melainkan sebuah kebijakan yang tidak mengikat Indonesia pada negara ataupun pihak manapun sekaligus menjadi kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial, ketertiban dunia, dan perdamaian abadi sehingga sudah seharusnya Indonesia membantu etnis Rohingya demi mewujudkan keinginannya ini (Embassy of The Republic of Indonesia in Washington D.C. The United States of America, 2018).

KESIMPULAN

Penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya telah membawanya ke dalam banyak keprihatinan yang membuat beberapa pihak ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuannya kepada etnis ini. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang membantu etnis Rohingya melalui bantuan luar negerinya. Bantuan luar negeri sendiri merupakan bantuan internasional yang disalurkan oleh suatu negara maupun lembaga internasional. Pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri mencakup atas tujuan dari bantuan luar negeri yang diberikan, diantaranya bantuan pada tujuan kemanusiaan, bantuan pada tujuan pembangunan dan bantuan pada tujuan diplomatik. Ketiga bantuan tersebut diberikan Indonesia kepada etnis Rohingya maupun pengungsi-pengungsi Rohingya yang berada di negaranya dan negara lainnya seperti Bangladesh dan Indonesia itu sendiri.

Pada bantuan luar negeri di tujuan kemanusiaan, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada etnis dan pengungsi Rohingya, seperti makanan, tenda pengungsi, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian, pada bantuan luar negeri yang bertujuan pembangunan, hal ini dilakukan agar dapat membantu kehidupan para warga negara yang kurang baik atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Pada bantuan ini, pemerintah Indonesia membangun beberapa sekolah di kawasan Rakhine, Myanmar agar pelajar-pelajar Rohingya dapat melanjutkan pendidikannya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga turut membangun rumah sakit di Rakhine yang mana beberapa warga Rohingya juga diperbolehkan untuk bekerja di rumah sakit ini. Terakhir, bantuan luar negeri yang bertujuan diplomatik, bantuan ini sendiri berhubungan dengan relasi antar negara. Pada bantuan ini sendiri, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan, diskusi, ataupun dialog dengan negara-negara lain seperti dengan Myanmar, Bangladesh dan sebagainya yang membahas terkait

permasalahan etnis Rohingya ataupun pengungsi Rohingya. Indonesia juga turut membawa topik permasalahan Rohingya ini pada suatu forum dan turut mengajak negara lainnya untuk membantu etnis tersebut.

Pemberian bantuan dari Indonesia tersebut diberikan kepada etnis Rohingya secara tahun ke tahunnya dari tahun 2014 hingga 2019, tanpa terkecuali. Pemberian bantuan-bantuan ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat etnis Rohingya. Pada beberapa kesempatan, Indonesia sendiri telah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Myanmar terkait bantuan apa saja yang mereka butuhkan.

SARAN

Indonesia dalam memberikan kebijakannya terkait bantuan luar negeri kepada Rohingya diharapkan juga dapat semakin mendorong Myanmar untuk mencari titik terang dari konflik yang terjadi pada etnis Rohingya ini. Konflik ini sendiri telah berlangsung sangat lama yang mana perlu jalan keluar agar penindasan pada masyarakat etnis Rohingya tidak semakin berlarut-larut. Apabila, konflik ini berlanjut semakin lama, hal tersebut dapat berdampak pada kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Selain itu juga, Indonesia diharapkan untuk tidak terlalu memaksakan bantuannya untuk Rohingya, sebagaimana itu terjadi pada kasus pengungsi Rohingya di tahun 2015 dimana sudah banyak pengungsi yang berada di Indonesia, namun Indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya yang datang.

Indonesia juga harus lebih tegas terhadap peraturan yang dibuatnya dalam penerimaan pengungsi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tidak kembali melanggar peraturan yang ada dengan menerima pengungsi secara sepihak. Indonesia juga harus lebih tegas lagi dalam urusan pengungsi Rohingya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi, seperti adanya penjualan narkoba yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, I. F., & Purwanto, A. J. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019. *Kajian Hubungan Internasional*, 1(1).
- Azizah, I. N. (2017). Peranan Indonesia Dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya Di Myanmar (2014-2017). *Global Political Studies Journal*, 1(2), 162–180. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i2.2022>
- BBC News Indonesia. (2017a, September 3). *Presiden Jokowi meminta pemerintah Myanmar “hentikan dan cegah kekerasan.”* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>
- BBC News Indonesia. (2017b, September 18). Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh “mulai dibagikan hari ini.” *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41302028>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th Editio). Oxford University Press.
- Chan, E. (2022). *Rohingya People*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Rohingya>
- Chickera, A. de. (2021). *Stateless and Persecuted: What Next for the Rohingya?* Migration Policy Institute. <https://www.migrationpolicy.org/article/stateless-persecuted-rohingya>
- Deutsche Welle. (2016, December 29). Indonesia Kirimkan Bantuan buat Rohingya. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/indonesia-kirimkan-bantuan-buat-rohingya/a-36939005>
- Deutsche Welle. (2017, September 13). Indonesia Kirim Bantuan untuk Rohingya. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/indonesia-kirim-bantuan-tahap-pertama-untuk-rohingya/a-40483431>
- Dewi, L. M. (2022). *Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya Unicef dalam Penyebaran Norma Hak Memperoleh Pendidikan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh (Tahun 2017-2020)*.
- Djumati, N. Y., Lengkong, J. P., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar. *Jurnal Politico*, 8(4).

- Driss, B. (2012). Rohingya Minority in Myanmar Between the Religious Persecution and the Reality of Constitutional Protection. *Brawijaya Law Journal*, 3(2), 221–241.
- Embassy of The Republic of Indonesia in Washington D.C. The United States of America. (2018). *Indonesia's Foreign Policy*. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/washington/en/pages/kebijakan_luar_negeri_ri/716/etc-menu
- Faye, M. (2021). A forced migration from Myanmar to Bangladesh and beyond: humanitarian response to Rohingya refugee crisis. *Journal of International Humanitarian Action*, 6(13). <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00098-4>
- Gischa, S. (2022, March 29). Mengenal Asal Usul Etnis Rohingya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/133000269/mengenal-asal-usul-etnis-rohingya?page=all>
- IPAC. (2018). *Indonesia and the Rohingya Crisis* (Issue 46). http://file.understandingconflict.org/file/2018/06/IPAC_Report_46.pdf
- Ivon. (2017). *Pemerintah Terus Kirim Bantuan Untuk Pengungsi Rohingya*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10726/pemerintah-terus-kirim-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya/0/berita>
- JDIH DPR RI. (n.d.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Dpr.Go.Id.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar. (2018). *Hubungan Bilateral Indonesia - Myanmar*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/yangon/id/read/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar/1743/etc-menu#>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019). *Humanitarian Issues*. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/portal/en/read/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan
- Komisi I DPR RI. (2015, August 24). Komisi I Terima LSM Peduli Rohingya. *Dpr.Go.Id*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10887/t/Komisi+I+Terima+LSM+Peduli+Rohingya>
- Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* (5th ed.). Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press. <https://doi.org/10.1017/S1537592707072738>
- Leba, E. E. (2019, December 20). Bantuan Indonesia untuk Repatriasi Pengungsi Rohingya Mulai Bergulir. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2019/12/20/bantuan-indonesia-untuk-repatriasi-pengungsi-rohingya-mulai-bergulir>
- Liputan 6. (2019, December 12). Pemerintah Indonesia Beri Bantuan Rumah Sakit Kepada Rohingya. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/global/read/4131912/pemerintah-indonesia-beri-bantuan-rumah-sakit-kepada-rohingya>
- Maharani, T. (2017, December 7). Myanmar Terima Kasih ke Indonesia atas Bantuan di Krisis Rohingya. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3759885/myanmar-terima-kasih-ke-indonesia-atas-bantuan-di-krisis-rohingya>
- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah*. [https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www/storage/document/JDIH Permenlu 15 Tahun 2020 ttg Perubahan Permenlu No. 11 Tahun 2019.pdf](https://jdih.kemlu.go.id/ildis/www/storage/document/JDIH%20Permenlu%2015%20Tahun%2020%20ttg%20Perubahan%20Permenlu%20No.%2011%20Tahun%202019.pdf)
- Mohajan, H. K. (2019). History of Rakhine State and the Origin of Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.34182>

- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1), 60–75. <https://doi.org/10.52447/gij.v1i1.755>
- Nugroho, S. P. (2018). *Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Bagi Pengungsi Rakhine*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-jokowi-serahkan-bantuan-bagi-pengungsi-rakhine>
- Nurhandayani, D. (2013). *Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*.
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (2017). *Indonesian Gov't Continues to Send Humanitarian Aid for Rohingya*. Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. <https://setkab.go.id/en/indonesian-govt-continues-to-send-humanitarian-aid-for-rohingya/>
- Permata, I. M., D, N. H., & Sinulingga, A. A. (2019). Humanitarian Diplomacy: Indonesia's Response Toward Rohingya Humanitarian Crisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 1(1), 1–12.
- Prabowo, G. (2020, December 3). Krisis Rohingya di Myanmar. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar?page=all>
- Purwanto, H. (2016, December 29). Indonesia dispatches delivery of humanitarian aid to Rohingya. *Antara News*. <https://en.antaranews.com/news/108653/indonesia-dispatches-delivery-of-humanitarian-aid-to-rohingya>
- Santi, N. (2014, December 11). Indonesia Bangun Sekolah Rohingya di Myanmar. *Tempo.Co*. <https://dunia.tempo.co/read/627862/indonesia-bangun-sekolah-rohingya-di-myanmar>
- Saputra, A. M. (2020). The Aid to Myanmar, Exercising Power of Indonesia Under Jokowi's Leadership. *Jurnal Sentris*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4148.1-13>
- Sari, D. S., Hidayat, T., & Prastiti, A. (2018). Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>
- Setiawan, A., & Hamka, H. (2020). *Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar. August 2017*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292481>
- Sugesti, T. (2019). *STF UIN Jakarta Gabung Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) Dirikan Bangunan di Rakhine State, Myanmar*. Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.stfuinjakarta.org/2019/04/25/stf-uin-jakarta-gabung-indonesian-humanitarian-alliance-ihadirikan-bangunan-di-rakhine-state-myanmar/#>
- Susetyo, H., Fitria, & Asyhari, R. (2016). *Rohingya: Stateless People and Nowhere To Go*. PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PAHAM) PUSAT INFORMASI DAN ADVOKASI ROHINGYA ARAKAN (PIARA) JL.
- Taufiqqurahman, M. (2017, September 19). Kecuali dari Indonesia, Myanmar Tolak Bantuan untuk Etnis Rohingnya. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3649373/kecuali-dari-indonesia-myanmar-tolak-bantuan-untuk-etnis-rohingnya>
- Tempo. (2017, September 15). Rohingya Aid from Indonesia Arrives in Bangladesh. *Tempo.Co*. <https://en.tempo.co/read/909318/rohingya-aid-from-indonesia-arrives-in-bangladesh>
- Tisnadibrata, I. L. (2017, September 13). Indonesia Kirim Bantuan untuk Pengungsi Rohingya. *Benar News*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-09132017140124.html>

- Tribun Jambi. (2016, December 7). Indonesia dan Myanmar Gelar Dialog Antar Agama, Selesaikan Konflik Etnis Rohingya. *TribunNews.Com*.
<https://jambi.tribunnews.com/2016/12/07/indonesia-dan-myanmar-gelar-dialog-antar-agama-selesaikan-konflik-etnis-rohingya>
- Triono. (2014). Peran ASEAN Dalam Konflik Etnis Rohingnya. *Jurnal TAPIS*, 10(2), 1–11.
- Waluyo, A. (2017a, September 4). Jokowi Sampaikan Aksi Nyata Indonesia Untuk Etnis Rohingya. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-sampaikan-aksi-nyata-indonesia-untuk-etnis-rohingya/4014081.html>
- Waluyo, A. (2017b, September 13). Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-lepas-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya-/4027272.html>